

## BAB V

### KESIMPULAN

Perubahan pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru ikut membawa perubahan dalam dunia perfilman nasional. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, sebuah Departemen secara khusus ditunjuk sebagai badan yang membina perfilman nasional. Melalui Departemen Penerangan, pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mencoba untuk mendorong produksi film nasional. Langkah awal yang ditempuh Departemen Penerangan adalah mencari sumber dana untuk menmbangkitkan kembali produksi film nasional. Sumber dana kemudian didapatkan dari sumbangan para importir film luar negeri sebagai syarat memasukkan film ke dalam negeri.

Kebijakan ini berhasil karena dari dana yang didapatkan, produksi film nasional dapat ditingkatkan dan perbaikan infrastruktur dalam dunia perfilman dapat dijalankan. Sayangnya kebijakan ini juga membawa dampak yang kurang baik untuk perfilman nasional sendiri. Banyak dana yang terkumpul sebanding dengan jumlah film import yang masuk ke dalam negeri. Akibat awal yang paling dirasakan adalah terjadi peniruan sejumlah film produksi nasional terhadap film-film impor yang banyak beredar pada waktu itu. Terlebih lagi peniruan ini cenderung mengarah ke sisi yang negatif. Film-film nasional banyak meniru dan ikut menampilkan adegan-adegan seks serta kekerasan karena melihat film-film import jenis inilah yang disenangi oleh masyarakat. Faktor meraih keuntunganlah yang kemudian selalu membuat sejumlah produser film nasional banyak menampilkan adegan-adegan seks dan kekerasan.

Menghadapi kecenderungan ini pemerintah bukannya tinggal diam saja, terbukti pemerintah kemudian membentuk sebuah Dewan Produksi Film Nasional yang ditujukan untuk memproduksi film-film bermutu. Maksud pemerintah adalah dengan pembuatan film-film yang bermutu yang tidak hanya menampilkan adegan-adegan seks dan kekerasan, produksi perfilman nasional dapat bergerak kearah yang lebih baik. Dewan Produksi Film Nasional kemudian berhasil

membuat empat buah film yang dibuat oleh sutradara-sutradara yang cukup punya nama dan pengalaman. Film-film itupun berhasil mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dan mendapatkan sejumlah penghargaan. Namun dengan alasan pemborosan biaya yang dibutuhkan DPFN untuk membuat film-filmnya, dewan ini kemudian dibubarkan. Sayangnya niat awal untuk membawa perubahan pada produksi film nasional tidak berjalan dengan baik, film-film yang menampilkan adegan-adegan seks dan kekerasan masih banyak diproduksi. Lagi-lagi dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan dan mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat film-film bermutu. Keuntungan kecil yang mungkin didapatkan oleh para produser film yang membuat film bermutu membuat mereka enggan untuk berspekulasi.

Pada tahun 1970 terjadi pergantian Menteri Penerangan yang kemudian ikut membuat terjadinya perubahan kebijakan. Di bawah Menteri Penerangan Budiarjo, perfilman nasional diarahkan untuk semakin meningkatkan jumlah produksinya. Kebijakan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Quantity Approach* (pendekatan jumlah) yang bisa juga disebut *Audience Approach* (pendekatan penonton). Dengan pendekatan ini diharapkan produksi film nasional dapat memperbaiki mutunya sendiri sejalan dengan peningkatan jumlah produksi film nasional. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian adalah mengalokasikan dana perfilman yang ada untuk sektor distribusi dan pertunjukkan. Pemberian pinjaman bagi para produser film kemudian juga ditetapkan sebanyak setengah biaya produksi film atau maksimal Rp. 7.500.000. Hasilnya produksi film nasional dan jumlah produser film meningkat cukup banyak, tetapi peningkatan terjadi pada penyajian cerita dan mutu film nasional. Kenyataannya film-film Indonesia kebanyakan kurang kreatif dalam penyajian tema cerita dan penggarapannya, yang kemudian mendapat kritik pedas dari kritikus film yang ada. Untuk mengatasi hal ini pemerintah bersama dengan sejumlah sineas yang cukup berpengalaman bekerjasama membentuk lembaga pendidikan untuk para sineas-sineas muda.

Masalah lain yang dihadapi perfilman nasional di pertengahan tahun tujuh puluh adalah sulitnya film nasional untuk dapat diputar dibioskop. Penyajian tema

cerita serta penggarapan film yang kurang baik dari sebagian besar film nasional membuat penonton lebih senang untuk menonton film-film impor. Film nasional bukannya tidak ada yang berkualitas, ada beberapa film yang berkualitas yang dibuat oleh para sineas yang cukup berpengalaman namun jumlahnya tidak banyak. Pihak bioskop dalam hal ini juga lebih senang memutar film import karena lebih menguntungkan dari pada memutar film nasional yang hanya mampu menghadirkan sedikit penonton. Hal ini kemudian menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan perfilman nasional. Untuk itu pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan tentang wajib putar film nasional minimal dua judul setiap bulan. PT Perfin kemudian juga didirikan untuk memastikan peredaran film nasional di bioskop dan didaerah-daerah. Namun PT Perfin tidak mampu menghadapi para booker yang telah lama mengatur peredaran film didaerah-daerah di Indonesia. Jaringan yang kuat antara *booker*, *broker*, pihak bioskop dan importir membuat PT Perfin kesulitan dalam mengatur peredaran film nasional. Sekali lagi faktor keuntungan yang masih menyebabkan pihak bioskop tentunya lebih senang memutar film impor dari pada memutar film nasional.

Jumlah produksi film nasional yang turun di tahun 1975 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan para importir untuk memproduksi film sebagai syarat untuk memasukkan film dari luar negeri. Dampak dari peraturan ini adalah peningkatan produksi film pada tahun 1976 dan 1977 walaupun sempat turun pada tahun 1978. Sekali lagi jumlah produksi film yang meningkat tidak diimbangi dengan adanya peningkatan mutu film. Film-film dengan adegan seks dan kekerasan masih saja banyak dibuat. Hal ini mendapat perhatian serius dari sejumlah kalangan pada penyelenggaraan FFI tahun 1978. Naiknya *Ali Murtopo* sebagai Menteri Penerangan pada April 1978 kemudian membawa perfilman nasional pada sejumlah perbaikan. Tahun 1979 Dewan Film Baru dibentuk dan dipimpin langsung oleh Menpen dan bekerjasama dengan sejumlah sineas berpengalaman. Tahun 1980 Dewan Film Nasional itu berhasil merumuskan sebuah pola pembinaan dasar bagi perfilman nasional. Pola baru ini dikenal dengan nama P4N, dan memberikan landasan bahwa film yang diproduksi haruslah bersifat “kultural edukatif”, yang artinya film yang diproduksi harus menggambarkan kebudayaan Indonesia dan bersifat mendidik.

Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu perkembangan produksi film nasional itu juga diikuti kontrol terhadap film. Kelemahan daya saing film nasional menjadi sebuah alasan memberikan bantuan dana serta membentuk sebuah badan pengawas produksi film nasional. Kontrol pemerintah ini tampak lebih jelas dalam peraturan sensor film. Pada awal tahun 1970 ditetapkan bahwa skenario film skenario mesti diserahkan terlebih dulu ke Direktorat Film di Deppen. Sensor film juga dengan tegas melarang film yang diproduksi menghina atau merendahkan aparaturnegara, menimbulkan perpecahan bangsa dan mengganggu hubungan negara dengan negara lain. Duduknya Menpen sebagai ketua DFN yang baru tahun 1979 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurus masalah perfilman sebagai sebuah media informasi yang komunikatif. Sekaligus merupakan sebuah fakta dari upaya pemerintah dalam mengontrol perfilman nasional.

